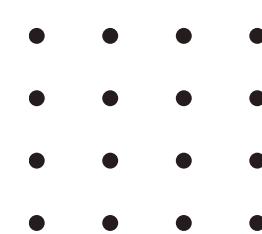


LAPORAN EVALUASI TRIWULAN II

TAHUN 2025



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun laporan setiap pertriwulan yang akan menjadi media pertanggungjawaban organisasi. Laporan ini merupakan bahan evaluasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam setiap pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Laporan kinerja triwulan II Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu Timur adalah perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada DPKPP Kabupaten Luwu Timur atas penggunaan anggaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja triwulan II DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai penjabaran visi dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

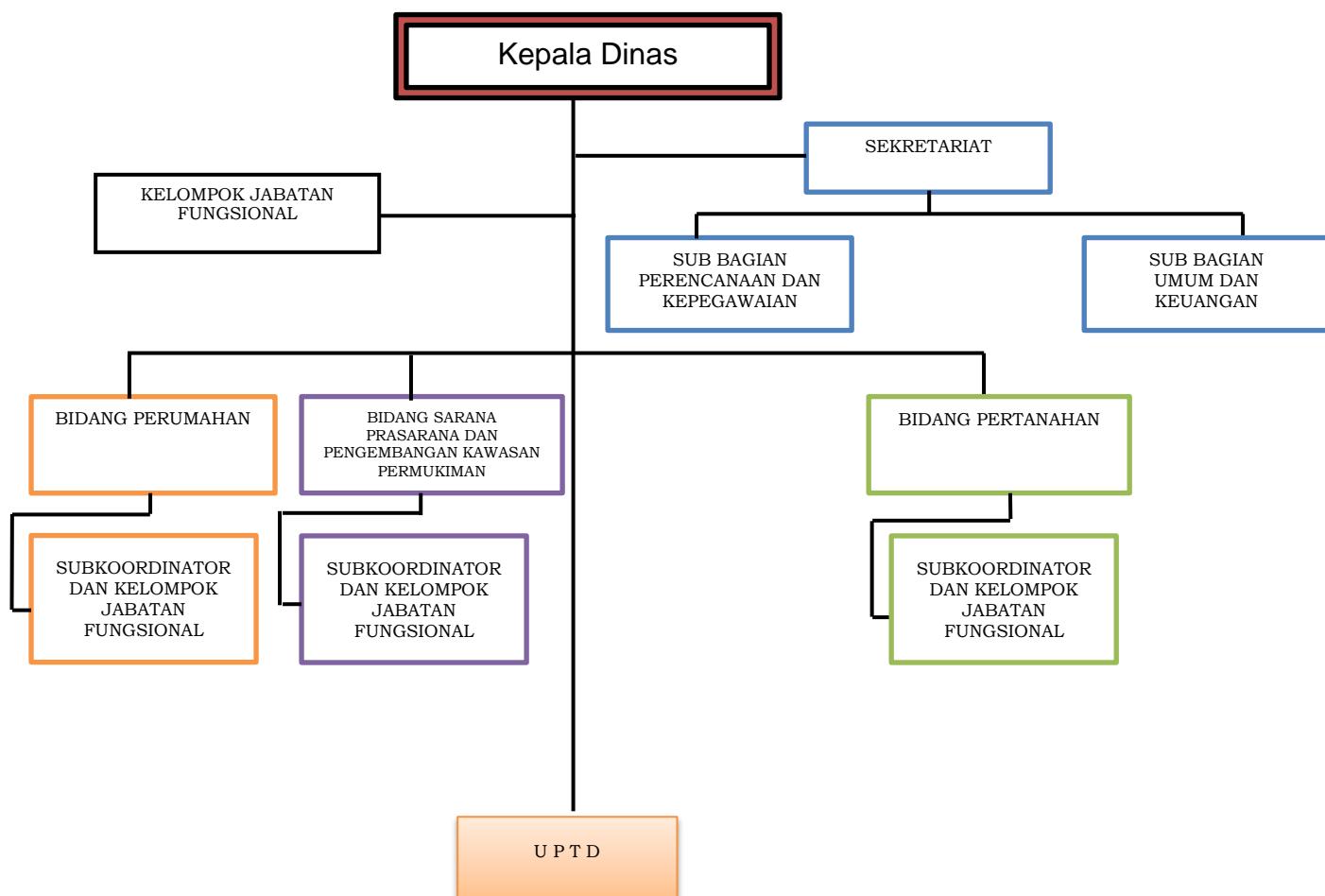
Tujuan Penyusunan laporan kinerja triwulan II DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi DPKPP Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kinerjanya.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, seperti termuat pada bagan di bawah ini sebagai berikut

STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok DPKPP Kabupaten Luwu Timur Sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi secara singkat, fungsi pokok dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan;
- Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- Merumuskan kebijakan teknis di pertanahan;
- Merumuskan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- Melaksanakan administrasi Dinas; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3. Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di DPKPP Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di DPKPP Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada. Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup DPKPP Kabupaten Luwu Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada tahun 2025 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:

Tabel 1
Komposisi SDM Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	17	4	21

Dari tabel 1.1 diatas digambarkan bahwa komposisi sumber daya manusia pada akhir tahun 2024 sebanyak 21 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 17 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 4 orang.

Tabel 2
Komposisi SDM
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	-	17	-	-	1	3	21

Dari tabel 1.2 diatas digambarkan bahwa jumlah Pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur pada triwulan I tahun 2025, berdasarkan jenjang pendidikan, S1 sebanyak 17 orang, D1 1 orang, SMA sebanyak 3 orang.

TABEL 3
Komposisi SDM
Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2025

No	Jenjang Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	II a	1	-	1
2	III a	1	-	1
3	III b	3	-	3
4	IV a	-	2	2
Total		5	2	7

Dari tabel 1.3 komposisi sumber daya manusia berdasarkan jenjang eselon sebanyak 7 orang, terdiri dari eselon II/a sebanyak 1 orang, eselon III/a sebanyak 1 orang eselon III/b sebanyak 3 orang dan eselon IV/a sebanyak 2 orang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Sesuai dengan Visi Luwu Timur yaitu **"LUWU TIMUR yang berkelanjutan dan Lebih maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"**.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka di perlukan misi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 melaksanakan misi ke-3 (M3), Ke-4 (M4) yaitu :

1. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang Berkualitas (M3);
2. Menciptakan Kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4).

3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan;
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai :

1. Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak;
2. Tersedianya tanah untuk kepentingan umum;
3. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

Tabel 4
Sasaran dan Indikator Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
TUJUAN 1 : Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	<i>Percentase Pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (%)</i>	80,12
	<i>Cakupan pengelolaan penggunaan dan Pemanfaatan tanah (%)</i>	100
SASARAN 1: Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	<i>Percentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah (%)</i>	5,61
	<i>Percentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani (%)</i>	45,37
SASARAN 2 Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	<i>Percentase Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah(%)</i>	100
TUJUAN 2: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Predikat Sakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	B
SASARAN 3: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	<i>Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</i>	68,40

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi, dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total huni	%	(Jumlah seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) – Jumlah RTLH yang ditangani) / Jumlah seluruh Rumah) x 100%	Laporan Bidang Perumahan	Bidang Perumahan
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten dibawah 10 ha yang tertangani	%	(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani/luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha)x 100%	Laporan Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman	Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman
2	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	%	(Luasan tanah yang dimanfaatkan/Luasan tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah) x100%	Laporan Bidang Pertanahan	Bidang Pertanahan

6. Program

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapainya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 6
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
DPKPP Kabupaten Luwu Timur

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
SASARAN 1: Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	1. Pengembangan Perumahan 2. Kawasan Permukiman 3. Peningkatan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)
SASARAN 2: Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 2. Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 3. Pengelolaan Tanah Kosong 4. Pengelolaan Izin Membuka Tanah 5. Penatagunaan Tanah
SASARAN 3: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025, berisi penjabaran dari upaya pencapaian tujuan, sasaran dan indikatornya. Pada Triwulan II Tahun 2025. Sasaran, indikator, target kinerja Program disajikan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Atas Perjanjian Kinerja (terlampir).

:

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target triwulan II. Dalam bab ini juga akan disajikan realisasi keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan I

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja triwulan II Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	5,61	0	0
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani	45,37	0	0
2.	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	100	0	0
3.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	68,40	0	0

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

Sasaran Strategis I

Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak

Tabel 8
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I

NO.	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	5,61	0	0
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani	45,37	0	0

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran I memiliki 2 indikator yaitu : Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah dan Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani.

➤ **Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah

sebagai berikut : “((Jumlah seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) – Jumlah RTLH yang ditangani)/Jumlah seluruh rumah) x 100%”. Indikator sasaran ini, dengan target 5,61 belum ada realisasi karena masih pada tahap perencanaan untuk masing-masing program yang mendukung tercapainya sasaran ini. Realisasi yang diperoleh merupakan hasil pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni yang disinkronkan dengan beberapa kegiatan dan program, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang beririsan dengan DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yaitu Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial dan P3A. Salah satu strategi dalam penurunan jumlah rumah tidak layak huni adalah peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan dan pemutakhiran data RTLH pada aplikasi e-RTLH, sehingga penanganan RTLH dapat tercapai dengan tepat sasaran dan maksimal. Mengacu kepada IKU Kepala Daerah, terkait pengukuran indeks daya saing infrastruktur daerah, maka DPKPP Kabupaten Luwu Timur beserta stakeholder lainnya mempunyai tugas untuk mencapai indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah, salah satunya peningkatan rumah tidak layak huni.

➤ **Persentase kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang Tertangani**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : “ Luas kawasan di bawah 10 ha yang ditangani dibagi luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha dikali seratus persen”. Indikator sasaran ini, dengan target 45,37% belum ada realisasi, karena masih pada tahap perencanaan untuk masing-masing program yang mendukung tercapainya sasaran ini. Realisasi yang diperoleh merupakan hasil pelaksanaan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu instrument untuk mengukur IKU Kepala Daerah terkait pengukuran Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah.

Rencana aksi untuk mendukung sasaran I adalah peningkatan kapasitas ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penyediaan hunian, peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman.

❖ Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran I yaitu :

❖  Program Pengembangan Perumahan :

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana

- atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 3. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- ❖  Program Kawasan Permukiman
 1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 2. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - ❖  Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - ❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Sasaran I, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

 - ❖  Belum diprioritaskannya anggaran untuk penanganan kawasan kumuh;
 - ❖  Belum optimalnya ketersedian data dan informasi dari perangkat daerah;
 - ❖  Belum meratanya pemahaman terkait penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan kawasan kumuh di beberapa stakeholder;
 - ❖  Telah banyak upaya penanganan rumah tidak layak huni yang telah dilakukan, namun belum terpetakan dengan baik.
 - ❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

 - ❖  Mengusulkan penggunaan dana desa selain untuk penanganan rumah tidak layak huni juga untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kawasan kumuh;
 - ❖  Melakukan pemutakhiran data dan informasi rumah tidak layak huni;
 - ❖  Melakukan sosialisasi terkait rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

- ❖ Melakukan pemetaan terkait upaya pencegahan dan penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di bawah 10 Ha;
- ❖ Efisiensi Anggaran
Dalam pencapaian sasaran strategis DPKPP Kab. Luwu Timur, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :
 - ❖ Terkait perbaikan rumah tidak layak huni, dilakukan pengusulan melalui APBN, Bantuan Keuangan Khusus yang dilaksanakan di Desa-Desa. Selain itu melalui kelompok Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Permukiman, diusulkan untuk bantuan prasarana sarana utilitas perumahan skala besar.
- ❖ Efisiensi Sumber Daya
 - ❖ Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang SPM, maka dapat terfasilitasi dengan adanya website resmi DPKPP Kabupaten Luwu Timur sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait kebencanaan dari media. Dan penyebarluasan informasi kebencanaan juga dilakukan melalui Media Sosial melalui FB, IG & . Yang merupakan PD yang beririsan dengan DPKPP terkait urusan penanganan SPM ini

2. Perbandingan antara target dan realisasi triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 9

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak						Target Tahun 2025 (%)	
	Triwulan Sebelumnya			Triwulan I				
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase penurunan jumlah rumah	0	0	0	0	0	0	5,61	

Sasaran I	Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak						Target Tahun 2025 (%)
	Triwulan Sebelumnya			Triwulan I			
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
tidak layak huni terhadap total rumah							
Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani	0	0	0	0	0	0	45,37

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan untuk capaian triwulan II, belum terealisasi, hal ini dikarenakan variable-variabel pada formulasi belum terpenuhi nilainya, sehingga belum dapat dihitung.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II dengan Target Jangka Menengah

Belum ada capaian pada triwulan II, dapat dijelaskan penentuan target pada sasaran I pada masing-masing indikator jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah :

- Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah, target ditetapkan mengacu pada realisasi yang diperoleh pada tahun 2025. Target yang ditetapkan mengacu pada realisasi yang diperoleh pada tahun 2025, hal ini dikarenakan target pada Renstra telah tercapai. Banyak faktor yang mendukung tercapainya indikator, diantaranya adalah kolaborasi dengan beberapa stake holder antara lain PUPR terkait layanan keciptakaryaan air minum, sanitasi, drainase, penerangan jalan, Dinas Lingkungan Hidup program persampahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Bantuan

Keuangan Khusus dengan program bedah rumah, Dinas Kesehatan pada program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan kesehatan bersumber daya masyarakat kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada program penanggulangan bencana

- ✚ Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani, target yang ditetapkan mengacu pada target pada jangka menengah tahun 2025, hal ini dikarenakan target pada tahun 2025 belum tercapai, sedangkan untuk target pada Renstra lebih tinggi untuk tahun 2025.

4. Perbandingan dengan Target Nasional (Rumah Layak Huni)

Pada triwulan II belum ada perbandingan yang dapat dihitung dengan target Nasional. Pada tahun sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mencatat capaian program tiga juta Rumah Tahun 2025.

5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran I

✚ Program Pengembangan Perumahan

Pengembangan perumahan merupakan proses perencanaan, pembangunan dan pengelolaan area hunian yang bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat. Sasaran Program ini adalah meningkatnya capaian pengembangan perumahan. Tujuan yang akan dicapai peningkatan akses terhadap tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Indikator program Pengembangan Perumahan Tahun 2025 terdiri dari 2 indikator yaitu :

- a. Persentase rumah yang dibangun pengembang (%), dengan formulasi jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang pada tahun n /jumlah rumah yang direncanakan oleh pengembang pada tahun $n \times 100\%$. Target triwulan 2 untuk rencana aksi adalah 25%, yaitu pendataan lokasi perumahan komersial, yang pada triwulan 2 terlaksana 10%, sehingga capaiannya 40%. Untuk target rencana kerja tahunan di rencanakan pada triwulan IV. Sehingga belum ada capaian.
- b. Persentase rumah warga Negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni, dengan formulasi jumlah unit rumah korban

bencana atau relokasi program Kabupaten yang direhabilitasi dan dibangun/jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten yang seharusnya direhabilitasi dan dibangun X 100%. Target triwulan 21 adalah 25% dan realisasi hanya 10%, sehingga capaian hanya 40%. Capaian tersebut berasal dari rencana aksi pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten, yang baru terlaksana pada 1 kecamatan yaitu Kecamatan Malili, dari total 11 Kecamatan.

Pada tahun 2025, Program Pengembangan Perumahan didukung oleh 3 kegiatan utama yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal yaitu:

i. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota adalah pelayanan informasi tentang penanganan bencana alam pra dan pasca bencana, yang merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan tempat tinggal yang layak. Indikator kegiatan adalah jumlah dokumen hasil pendataan identifikasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang akan dibangun dan direhabilitasi serta jumlah dokumen hasil pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang termanfaatkan sebagai bahan informasi perumahan. Untuk indikator ini yang ditargetkan dari rencana aksi adalah 25% terealisasi baru 10%. Sedangkan untuk rencana kerja ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Subkegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus adalah pengumpulan data dari 11 Kecamatan dengan mendata identitas pemilik, penyewa, alamat dan lokasi, luas bangunan dan fasilitas yang tersedia, kriteria penerimaan penghuni, indikator jumlah laporan hasil pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang termanfaatkan sebagai bahan informasi perumahan, persentase capaian kinerja ditargetkan pada triwulan IV, sedangkan untuk capaian rencana aksi hanya 40%.
- b. Subkegiatan Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, aktifitas pada subkegiatan ini adalah mengumpulkan data dengan mengambil data dasar dari dokumen bencana yang telah diterbitkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan, Indikator Jumlah laporan hasil pendataan perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten. Persentase capaian kinerja ditargetkan pada triwulan IV, sedangkan untuk capaian rencana aksi hanya 40%, untuk triwulan I.

ii. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau

Relokasi Program Kabupaten/Kota adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang terdampak bencana atau yang perlu dipindahkan dari daerah rawan. Aktifitas kegiatan ini adalah untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan dan pemulihan kondisi hidup masyarakat yang terkena dampak bencana. Belum ada pencapaian pada target untuk kegiatan ini. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, indikatornya adalah jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi
- b. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana, indikatornya adalah jumlah rumah korban bencana yang dibangun
- c. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota, indikatornya jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban relokasi program Kabupaten/Kota yang dibangun

Untuk kegiatan dan subkegiatan pada point ii, terlaksana jika ada bencana yang terjadi, yang disahkan melalui Surat Keputusan Bupati.

iii. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa rumah susun dan rumah khusus dikelola dengan baik, layak huni dan berkelanjutan. Indikator kegiatan ini adalah Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola (persen), dengan formulasi jumlah rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang ditangani dibagi seluruh jumlah rumah susun umum dan/atau rumah khusus seluruhnya dikali seratus persen. Capaian untuk kegiatan ini hanya 40%, untuk realisasi kinerja 10% dari 25% yang ditargetkan dengan capaian 40%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, aktifitas pada subkegiatan ini adalah peningkatan kemampuan

pengelola dan penghuni dalam menjaga, merawat dan mengelola lingkungan rumah susun dan/atau rumah umum, melalui pembentukan struktur organisasi pengelola, penguatan kapasitas pengelola dan penghuni, perencanaan dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas lingkungan hunian, pemberdayaan masyarakat, penyusunan aturan dan kebijakan, monitoring dan evaluasi, tindak lanjut dan peningkatan serta pelaporan dan transparansi indikator jumlah rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola. Capaian pada subkegiatan ini tidak ada karena ditargetkan pada triwulan IV, sedangkan untuk rencana aksi, capaiannya hanya 40%, karena masih pada tahap identifikasi kepemilikan penghuni pada Rusunawa.

IV. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan adalah proses administratif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan pembangunan perumahan agar sesuai dengan rencana tata ruang, standar teknis, dan peraturan yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan perumahan dilakukan secara legal, aman, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan. Indikator kegiatan adalah Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi. Aktifitas kegiatan ini adalah penyusunan dokumen terkait pertimbangan teknis terkait rencana tata ruang dan standar teknis sesuai kewenangan urusan perumahan. Capaian kinerja dari kegiatan ini pada triwulan II adalah 25%, sedangkan untuk capaian rencana aksi hanya 40% Pencapaian target kegiatan ini didukung dengan subkegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan aktifitas pada subkegiatan ini adalah koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan seperti PUPR, DLH, PTSP dan kantor Pertanahan, dengan memberikan masukan atau pertimbangan teknis terkait rencana tata ruang dan standar teknis sesuai kewenangan urusan perumahan. Indikator subkegiatan ini adalah Jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi. Capaian 100% untuk target kinerja karena ditargetkan masing-masing 1

dokumen setiap triwulan dan 100% untuk rencana aksi. Berikut tabel capaian program Pengembangan Perumahan

Tabel 10
 Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Pengembangan

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN		CAPAIAN TRIWULAN		PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV	I	II	I	II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	6	11
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100%	25%	25%	25%	25%	10%	25%	40%	100%	Bidang Perumahan
		Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100%	25%	25%	25%	25%	10%	25%	40%	100%	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase daerah rawan bencana yang telah dilakukan identifikasi	100%	25%	25%	25%	25%	10%	25%	40%	100%	
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	4 Dokumen	25%	25%	25%	25%	10%	25%	40%	100%	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20%	30%	0%	50%	10%	30%	50%	100%	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN		CAPAIAN TRIWULAN		PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV	I	II	I	II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	6	11
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang tertangani	100%	0%	0%	0%	100%	10%	0%	0%	0%	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 unit Rumah	0%	0%	0%	100%	10%	0%	0%	0%	
	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 unit Rumah	0%	0%	0%	100%	10%	0%	0%	0%	
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0 unit Rumah	0%	0%	0%	100%	10%	0%	0%	0%	
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang dikelola	100%	25%	25%	25%	25%	10%	25%	40%	100%	
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4 dokumen	25%	25%	25%	25%	10%	25%	40%	100%	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase pengembang perumahan yang difasilitasi	100%	25%	25%	25%	25%	10%	25%	40%	100%	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN		CAPAIAN TRIWULAN		PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV	I	II	I	II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	6	11
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4 laporan	25%	25%	25%	25%	10%	25%	40%	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	19,30%	25%	25%	25%	25%	10%	25%	40%	100%	Bidang Perumahan
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah penyediaan prasarana dan sarana pada perumahan	12 Lingkungan	25%	25%	25%	25%	10%	25%	40%	100%	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	11 lokasi	25%	25%	25%	25%	10%	25%	40%	100%	

Program Kawasan Permukiman

Program kawasan permukiman merupakan aksi dan inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, memperbaiki infrastruktur dan mengembangkan lingkungan yang berkelanjutan. Sasaran program ini adalah meningkatnya rumah layak huni dan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani. Indikator program tahun 2025 ada 2 yaitu :

- a. Rasio rumah layak huni, dengan formulasi jumlah rumah layak huni dibagi jumlah penduduk. Target triwulan 2 untuk rencana aksi adalah 25%, yaitu pelaksanaan dan monitoring bedah rumah, yang pada triwulan I terlaksana hanya 10%, sehingga capaian hanya 40%, untuk target kinerja direncanakan pada triwulan IV. Sehingga belum ada capaian.
- b. Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani, dengan formulasi luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani dibagi luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha. Target triwulan 2 adalah 25% dan realisasi hanya 10%, sehingga capaian hanya 40%. Capaian tersebut berasal dari rencana aksi penginputan paket kegiatan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SIRUP).

Pada tahun 2025, Program Kawasan Permukiman didukung oleh 3 kegiatan utama yaitu:

- Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman adalah proses yang diatur oleh peraturan pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang, standar teknis dan persyaratan lingkungan yang berlaku. Indikator kegiatan adalah Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi. Aktifitas pada kegiatan ini adalah penyusunan dokumen dari hasil koordinasi dengan Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD), dengan menghasilkan pertimbangan teknis kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang , substansi standar teknis pemenuhan upaya pengelolaan lingkungan dan pertimbangan teknis lainnya yang dibutuhkan pada proses pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. Untuk indikator ini yang

ditargetkan dari rencana aksi 25% terealisasi hanya 10%. Pencapaian rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan permukiman, aktifitas subkegiatan ini adalah kegiatan koordinasi teknis rencana pembangunan, penyusunan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi, terealisasi 25% dengan capaian rencana aksi 100% dan rencana kerja 100% dari 1 dokumwn yang ditargetkan pada triwulan I.
- Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha merupakan salah satu kegiatan dalam upaya mengatasi masalah permukiman yang tidak layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aktifitas kegiatan ini adalah penyusunan dokumen yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penyelesaian masalah perumahan dan permukiman kumuh. Indikator, Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi. Indikator kegiatan ini adalah jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi, terealisasi 10% dengan capaian rencana aksi 40% dan rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
 - a. Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP adalah review Renacana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan penyusunan dokumen Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB), dengan indikator jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/terreview/terlegalisasi. terealisasi 10% dengan capaian rencana aksi 40% dan rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada triwulan IV
 - Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan

Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha merupakan salah satu kegiatan dalam upaya mengatasi masalah perumahan yang tidak layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aktifitas kegiatan ini berfokus pada perbaikan infrastruktur, sanitasi, kesehatan dan lingkungan, yang merupakan perwujudan untuk pencegahan kawasan kumuh dan perolehan rumah layak huni. Indikator pada kegiatan ini ada 2 yaitu :

- Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dengan formulasi “jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu”. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi 10% dengan capaian 40%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada triwulan IV.
- Luas penanganan infrastruktur kawasan kumuh (Ha), aktifitas untuk memperoleh indikator ini adalah penanganan dan pencegahan kawasan kumuh dengan kegiatan pembangunan dan peningkatan. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi 10% dengan capaian 40%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada triwulan IV.

Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, aktifitas pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi rumah tidak layak huni dan melakukan penanganan dengan berkoordinasi dengan aparat Desa sebagai pelaksana bedah rumah yang dilaksanakan di Desa dengan menggunakan BKK dan fasilitator sebagai pelaksana BSPS dengan anggaran yang bersumber dari APBN. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi 10% dengan capaian 40%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada triwulan IV.
- b. Subkegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, aktifitas pada kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan fisik dan pemeliharaan untuk prasarana yang termasuk dalam kawasan kumuh dan yang merupakan aset DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang dimulai dari penyusunan perencanaan ***Detail Engineering Design***, pembangunan dan pengawasan. Indikator, luas permukiman

yang dipugar. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi 10% dengan capaian 40%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada triwulan IV. Berikut tabel capaian program Kawasan Permukiman,

Tabel 11
 Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Kawasan Permukiman

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN		CAPAIAN TRIWULAN		PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV	I	II	I	II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio rumah layak huni	18,94%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman
		Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%)	16,71 %	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi	1 Dokumen	25%	25%	25%	25%	10%	25%	40%	100%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman	4 Laporan	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas penanganan infrstruktur kawasan kumuh	14,2 Ha	25%	25%	25%	25%	10%	25%	40%	100%	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN		CAPAIAN TRIWULAN		PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV	I	II	I	II	
	Penyusunan/Revie/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	2 Dokumen	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dan responsif gender	70,62%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
		Luas penanganan infrstruktur kawasan kumuh	14,20 ha	25%	25%	25%	25%	10%	25%	40%	100%	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	105 unit Rumah	25%	25%	25%	25%	10%	25%	40%	100%	
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	14,20 Ha	25%	25%	25%	25%	10%	25%	40%	100%	

Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

Program ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap prasarana, sarana dan utilitas dasar yang memadai. Sasaran program ini adalah terlaksananya peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum PSU. Indikator, Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan formulasi jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu dikali 100. Target triwulan 2 adalah 25% dan realisasi hanya 10%, sehingga capaian hanya 40%. Pada tahun 2025, Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

i. **Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** adalah bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kehidupan di lingkungan perumahan. Indikator pada kegiatan ini adalah jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi 10% dengan capaian 40%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Subkegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan fisik dan pemeliharaan untuk prasarana, sarana dan utilitas yang termasuk dalam kawasan kumuh dan yang merupakan aset DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang dimulai dari penyusunan perencanaan ***Detail Engineering Design***, pembangunan dan pengawasan. Indikator Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi 10% dengan capaian 40%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada triwulan IV. Berikut tabel capaian program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

Tabel 12
 Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI KINERJA	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN		CAPAIAN TRIWULAN		KET
					I	II	III	IV	I	II	I	II	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU	19,30%	0	25%	25%	25%	25%	10%	10%	40%	40%	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah seluruh lingkungan perumahan yang didukung PSU	12 perumahan	0	25%	25%	25%	25%	10%	10%	40%	40%	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU	11 lokasi	0	25%	25%	25%	25%	10%	10%	40%	40%	

Sasaran Strategis II

Tersedianya tanah untuk kepentingan umum

Tabel 13
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	95	0	0

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran II memiliki indikator persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah, dengan formulasi “ luasan tanah yang dimanfaatkan/luasan tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah) x 100%. Target indikator sasaran II adalah 95%, belum ada realisasi, hal ini dikarenakan variable yang digunakan untuk menghitung capaian target belum tercapai. Rencana aksi untuk mendukung sasaran II adalah perencanaan pengadaan tanah, identifikasi dan verifikasi tanah aset pemda yang akan dilakukan pengamanan dan sertifikasi, penetapan izin lokasi dan penyelesaian kasus tanah.

- ❖ Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran II yaitu :
 - ✚ Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - ✚ Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
 1. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
 - ✚ Program Pengelolaan Tanah Kosong
 1. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
 - ✚ Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
 1. Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah
 - ✚ Program Penatagunaan Tanah
 1. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah

Kabupaten/Kota

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- ⊕ Kurangnya sosialisasi terkait pelayanan tanah;
- ⊕ Minimnya kualitas SDM pertanahan;
- ⊕ Kurang optimalnya dokumentasi administrasi tanah.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- ⊕ Melakukan sosialisasi melalui media social dan melalui papan informasi publik;
- ⊕ Memaksimalkan koordinasi lintas perangkat daerah, maupun instansi vertical Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, terkait pelaksanaan program/kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian pelayanan pertanahan.

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis 2, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu:

- ⊕ Penggunaan dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Desa untuk pelaksanaan persertifikatan aset Desa;
- ⊕ Efisiensi anggaran yaitu persertifikatan tanah warga dan tanah rumah ibadah, dimasukkan ke program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dengan pembebasan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang merupakan syarat untuk persertifikatan gratis.

❖ Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian sasaran 2, dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yaitu:

- ⊕ Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi pelayanan pertanahan;
- ⊕ Komunikasi yang aktif dengan SDM yang ada pada kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, untuk percepatan pelayanan urusan pertanahan

2. Perbandingan antara target dan realisasi triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 14

Perbandingan Target Realisasi Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum						Target Tahun 2024 (%)	
	Triwulan Sebelumnya			Triwulan II				
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	95%	

Berdasarkan tabel di atas belum dapat dijelaskan untuk capaian triwulan II, hal ini dikarenakan variable-variabel pada formulasi belum terpenuhi nilainya, sehingga belum dapat dihitung.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II dengan Target Jangka Menengah

Belum ada capaian pada triwulan II, dapat dijelaskan penentuan target pada sasaran II jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sama.

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II	Rata-rata realisasi sampai dengan Tahun 2025	Target Akhir Renstra
1	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	0	0	95,00

4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran II

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini merujuk pada proses penyelesaian konflik atau perselisihan yang terjadi terkait kepemilikan atau penggunaan lahan garapan di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Indikator, persentase penyelesaian kasus tanah Negara dengan formulasi jumlah kasus yang ditangani dibagi jumlah kasus yang terdaftar kali 100%. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%.

Pada tahun 2025, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan didukung 1 kegiatan :

i. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan fasilitasi penyelesaian kasus. Indikator jumlah kasus terdaftar. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja 100% dengan 1 laporan dan 1 untuk realisasi, sehingga capaian 100%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

a. Subkegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan koordinasi dan rapat-rapat bersama stakeholder yang terkait dalam memfasilitasi penyelesaian kasus tanah yang bersinggungan dengan aset Pemda yang dilaporkan. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja 100% dengan 1 laporan dan 1 untuk realisasi, sehingga capaian 100%, yaitu permohonan pengembalian hak-hak masyarakat yang diklaim oleh PTPN (Persero) unit Kebun Malili dan penyamaan persepsi dan pandangan terhadap wilayah konsesi/kontrak Karya/IUP – K PT.Vale Ind, Tbk yang diantaranya masuk tercatat sebagai aset tanah Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur yang akan disertifikatkan serta rencana pelepasan HGB PT. Vale Ind, Tbk disekitar area Kantor Camat Nuha Desa Sorowako.

Tabel 15

Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN		CAPAIAN TRIWULAN		KET
					I	II	III	IV	I	II	I	II	
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus terdaftar	5 kasus	1	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	3 berita acara	1	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program ini dirancang oleh Pemerintah untuk memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah dan pihak-pihak yang terkena dampak dari proyek pembangunan infrastruktur. Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah pendataan, inventarisasi, konsultansi publik, negosiasi dan kesepakatan, pembayaran ganti kerugian, relokasi dan santunan. Sasaran program ini adalah meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Indikator Persentase luas lahan yang dibebaskan, dengan formulasi luas lahan yang dibebaskan pada tahun n dibagi luas lahan kebutuhan pembangunan Kabupaten pada tahun n dikali 100%. Target triwulan 2 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, didukung 1 kegiatan :

- i. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan sebagai fasilitasi pembebasan tanah. Indikator luas lahan kebutuhan pembangunan Kabupaten pertaahun pada tahun n (m^2). Target triwulan 2 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan :
 - a. Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu), aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang membutuhkan tanah dengan pelaksanaan perencanaan dengan appraisal untuk menentukan harga tanah. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pelaksanaan pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Desa Wewangriu Kecamatan Malili, yaitu sementara proses kelengkapan berkas untuk pembayaran tahap II.

Program Pengelolaan Tanah Kosong

Program ini dirancang untuk memanfaatkan tanah kosong atau tidak terpakai di daerah agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Elemen-elemen utama yang dilaksanakan adalah identifikasi, inventarisasi,

pendataan dan pengamanan. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan tanah kosong. Indikator, persentase pengamanan tanah kosong aset Pemerintah Daerah, dengan formulasi jumlah bidang yang dilakukan pengamanan dibagi jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi dikali 100%. Target triwulan 2 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target program ini didukung oleh kegiatan,

- i. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong adalah kegiatan untuk menginventarisasi aset pemda untuk diberikan tanda pengenal dengan patok dan papan pengumuman. Indikator, jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi. Target triwulan 2 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan pemberian patok dan papan pengumuman pada tanah aset Pemda yang telah didata
 - a. Subkegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan pemberian patok dan papan pengumuman pada tanah aset Pemda yang telah didata. Target triwulan 2 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Aksi pada triwulan 2 yaitu proses perencanaan administrasi pada aplikasi SIRUP, untuk pelacakan titik persil pengadaan patok dan papan pengumuman.

Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Program ini bertujuan mengatur dan mengelola proses pemberian izin bagi aktivitas pembukaan lahan untuk aset Pemda. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah, indikator persentase izin lokasi, formulasi jumlah izin lokasi dibagi permohonan izin lokasi dikali 100%. Target triwulan 2 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan III. Pencapaian target program ini didukung oleh kegiatan,

- i. Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah, adalah izin yang diberikan untuk

penentuan lokasi tanah aset Pemda yang akan dimanfaatkan. Indikator, jumlah dokumen kegiatan Pengendalian pemanfaatan. Target triwulan 2 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan III. Pencapaian target ini didukung oleh subkegiatan,

a. Subkegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan fasilitasi penentuan lokasi dengan penetapan surat keputusan Bupati untuk tanah aset pemda yang akan dimanfaatkan. Target triwulan 2 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan II, sehingga pada triwulan I belum ada capaian kinerja.

Program Penatagunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

Program ini adalah upaya pemerintah untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan lahan secara optimal dan berkelanjutan, sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijakan penggunaan lahan. Sasaran program ini adalah meningkatnya penatagunaan tanah. Indikator, persentase luas lahan bersertifikat, dengan formulasi luas lahan bersertifikat dibagi luas wilayah seluruh Kabupaten pada tahun n dikali 100%. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Untuk kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target ini didukung oleh kegiatan,

i. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota, merujuk pada aktivitas pemanfaatan lahan atau tanah yang seluruh wilayahnya terletak dalam batas administrative Kabupaten. Indikator luas lahan bersertifikat yang difasilitasi. Target triwulan 2 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target ini didukung oleh subkegiatan,

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota, aktifitas pada subkegiatan ini adalah fasilitasi persertifikatan aset Pemerintah Daerah, indikator luas lahan bersertifikat yang difasilitasi. Target triwulan 2 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Sementara menunggu data

aset tanah Pemda yang belum memiliki sertifikat di bidang Aset.

Tabel 16
 Capaian Kegiatan/Subkegiatan Sasaran I

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN		CAPAIAN TRIWULAN		KET.
					I	II	III	IV	I	II	I	II	
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus terdaftar	5 kasus	1	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	3 berita acara	1	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase luas lahan yang dibebaskan	100%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan kebutuhan pembangunan kabupaten pertahun pada tahun n	100.000 m ²	0	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN		CAPAIAN TRIWULAN		KET.
					I	II	III	IV	I	II	I	II	
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan yang dibebaskan pada tahun n (m ²)	3 Dokumen	0	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
3	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengamanan tanah kosong aset Pemda	100%	0	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah laporan bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi	4 laporan	1	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang dilakukan pengamanan melalui pengadaan sarana prasarana	15 bidang	0	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
4	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin lokasi	100%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara	2 dokumen	1	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah izin lokasi yang ditangani	3 dokumen	1	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
5	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	40,15%	0	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN		CAPAIAN TRIWULAN		KET.
					I	II	III	IV	I	II	I	II	
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas lahan bersertifikat yang difasilitasi	100%	0	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Luas Lahan bersertifikat yang difasilitasi	500.000 m2	0	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	

Sasaran Strategis II

Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

Tabel 17

Capaian Sasaran III

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	68,40	0	0

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran III memiliki indikator nilai Lakip DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang realisasinya ini diperoleh dari hasil penilaian Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. LAKIP merupakan gambaran kinerja yang dicapai oleh perangkat daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD. Sehingga untuk capaian pada sasaran ini belum diperoleh pada triwulan I.

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

⊕ Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan yang mendukung:

- i. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, subkegiatan yang mendukung:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, subkegiatan yang mendukung:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- iii. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- iv. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- v. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- vi. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- vii. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- viii. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ix. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- ❖ Hambatan/Kendala
 - Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:
 - a. Keterlambatan proses administrasi pengadaan barang dan jasa (e-

catalog);

- b. Keterlambatan proses administrasi keuangan;
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- a. Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPk terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog);
- b. Mencermati rekening belanja dalam proses realisasi keuangan;
- c. Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- d. Melakukan perseuratan ke BKPSDM terkait kebutuhan pegawai.

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu:

- a. Efisiensi anggaran pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada;
- b. Efisiensi belanja internet kantor yaitu biaya wifi kantor, difasilitasi oleh Dinas Kominfo-SP

❖ Efisiensi Sumber Daya

- a. Terdapat jabatan pelaksana yang masih kosong pada lingkup secretariat dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN;
- b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan secara berkala untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN

2. Perbandingan anatara Target dan Realisasi dengan Sebelumnya

Adapun target dan realisasi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 18
 Target dan Realisasi Triwulan II

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI KINERJA	TARGET TRIWULAN		REALISASI TRIWULAN		CAPAIAN TRIWULAN	
					I	II	I	II	I	II
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	0%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	17 dokumen	0 dokumen	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	3 dokumen	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1 dokumen	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1 dokumen	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Laporan	0 laporan	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100%	0%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang/bulan	0 orang/bulan	25%	25%	25%	25%	100%	100%

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI KINERJA	TARGET TRIWULAN		REALISASI TRIWULAN		CAPAIAN TRIWULAN	
					I	II	I	II	I	II
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18 laporan	0 laporan	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BDM pada perangkat daerah yang ditatausahakan	100%	0%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	0 laporan	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah	742.242.000	0	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	0 dokumen	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	0%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 dokumen	0 dokumen	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	23 orang	0 orang	25%	25%	25%	25%	100%	100%

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI KINERJA	TARGET TRIWULAN		REALISASI TRIWULAN		CAPAIAN TRIWULAN	
					I	II	I	II	I	II
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	0%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	0 paket	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	0 paket	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	0 paket	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	0 paket	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan	72 dokumen	0 dokumen	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	0 laporan	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	0 laporan	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	3 paket	0 paket	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	29 unit	0 unit	25%	25%	25%	25%	100%	100%

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI KINERJA	TARGET TRIWULAN		REALISASI TRIWULAN		CAPAIAN TRIWULAN	
					I	II	I	II	I	II
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	0 unit	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	0%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	0 laporan	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	0 laporan	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasan pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	0 laporan	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	84 unit	0 unit	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	0 unit	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	67 unit	0 unit	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	0 unit	25%	25%	25%	25%	100%	100%

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan ini dengan Target Jangka Menengah.

Pada triwulan II, yang dapat dibandingkan hanya pencapaian antara kegiatan dan subkegiatan, karena sifatnya dilaksanakan secara rutin.

4. Capaian Program Pendukung Sasaran III

Tabel 19

Capaian Program Pendukung Sasaran III

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUNAN	REALISASI I TAHUNAN	TARGET TRIWULAN		REALISASI TRIWULAN		CAPAIAN TRIWULAN	
					I	II	I	II	I	II
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	50%	25%	25%	25%	25%	100 %	100 %

Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada subbagian perencanaan dan Kepegawaian. Adapun kegiatan dan subkegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

adalah penyiapan dokumen, melalui tiga tahap penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang saling terkait untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu timur. Indikator kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu jumlah. Tahapan target rencana aksi pada triwulan II (satu), terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga capaian 100%. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 4 subkegiatan antara lain :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah proses penyusunan dokumen rencana kerja yang menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan. Dokumen perencanaan ini dibuat untuk jangka waktu tertentu dan menjadi dasar penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Untuk triwulan II ditargetkan untuk penyusunan

Rencana Kerja APBD 2025, dengan rencana aksi pengumpulan data dan informasi kegiatan, melalui tahapan musrembang, identifikasi dan verifikasi usulan kegiatan prioritas, untuk menyusun kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang kemudian akan dituangkan pada dokumen renja APBD 2025.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah proses penyusunan rincian anggaran setelah program dan kegiatan diidentifikasi. Untuk subkegiatan ini ditargetkan pada triwulan II, pada triwulan II terlaksana rencana aksi, rincian kebutuhan anggaran berdasarkan jenis belanja, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal, yang disusun secara rinci dan realitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD adalah tahapan lanjutan dari penyusunan RKA-SKPD yang berfokus pada pengesahan dan pelaksanaan anggaran yang telah disetujui. Untuk subkegiatan rencana aksi dan target tahunan ditetapkan pada triwulan III dan IV. Pada triwulan II (satu) telah menjadi bagian dari rencana aksi subkegiatan sebelumnya yaitu pelaksanaan koordinasi internal (antarbidang) dan eksternal (TAPD).
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah proses untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari dampak kinerja perangkat daerah. Rencana aksi pada subkegiatan ini, meliputi pengumpulan data, analisis dan penilaian berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah penataan keuangan, pencatatan, pengeluaran dan pemasukan melalui tiga tahap penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang saling terkait untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu timur. Indikator kegiatan adalah tersedianya gaji dan tunjangan, laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun tepat waktu . Tahapan target rencana aksi pada triwulan II (satu), terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga capaian 100%. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 2 subkegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan adalah besaran anggaran yang dibayarkan kepada PNS berupa gaji pokok dan tunjangan yang menjadi pedoman

pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ini dibuat untuk memastikan bahwa pegawai mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku dan menjadi dasar penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Untuk triwulan II ditargetkan untuk penyusunan Rencana Kerja APBD 2025 dan APBD-P 2024, dengan rencana aksi pengumpulan data penambahan pegawai untuk menyusun kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang kemudian akan dituangkan pada dokumen renja APBD 2025 dan APBD-P 2024.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD adalah proses penyusunan laporan keuangan SKPD berupa laporan realisasi keuangan, neraca, dan catatan atas laporan keuangan SKPD. Untuk subkegiatan ini ditargetkan pada triwulan II, yang terlaksana rencana aksi, rincian kebutuhan anggaran berdasarkan jenis belanja, antara lain belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, belanja alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja bahan cetak, belanja bahan komputer, belanja makan minum rapat dan belanja perjalanan dinas, yang disusun secara rinci dan realitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, untuk APBD 2025 dan APBD-P 2024.

2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum barang dilingkup DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Indikator kegiatan adalah persentase barang milik daerah yang ditatausahakan. Tahapan target rencana aksi pada kegiatan ini adalah Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 1 subkegiatan antara lain :

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Rencana aksi pada triwulan II (dua) yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah rincian kebutuhan anggaran berdasarkan jenis belanja, antara lain belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, belanja kertas dan cover dan belanja cetak.

3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah adalah proses pengumpulan data penghuni yang ada pada rusunawa sumasang, rusunawa ASN dan memastikan bahwa data yang terkumpul akurat dan lengkap. Rencana aksi pada triwulan II (dua) yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah melakukan pendataan ulang penghuni rusunawa sumasang dan rusunawa ASN. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 1 subkegiatan antara lain :

a .Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah adalah proses perhitungan jumlah retribusi. Rencana aksi pada triwulan II (dua) yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, belanja alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja bahan cetak dan belanja bahan computer

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah proses dan tugas yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan administrasi pegawai dilingkup DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Indikator kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah. Tahapan target rencana aksi pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan administrasi yang dibutuhkan pegawai serta menganalisis jabatan dan beban kerja pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 2 subkegiatan antara lain :

b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah proses mengumpulkan informasi pegawai dan memastikan bahwa data yang terkumpul akurat dan lengkap. Rencana aksi pada triwulan I (satu) yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah pengolahan administrasi pegawai antara lain administrasi gaji dan tunjangan berupa pembuatan Kenaikan gaji berkala, pengelolaan cuti dan presensi serta sosialisasi dan pendampingan pengisian aplikasi E-Kinerja untuk periode Januari sampai dengan Desember 2024.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah salah

peningkatan kapasitas SDM yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tugas dan fungsi. Rencana aksi yang dilakukan pada triwulan I adalah pengusulan ASN untuk mengikuti beberapa diklat/bimbingan teknis yang berkait dengan tusi secara teknis.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah proses pencatatan, pembukuan, surat menyurat, kearsipan, dan lain sebagainya. Indikator kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah. Tahapan target rencana aksi pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan administrasi komponen instalasi Listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan ruah tangga, kebutuhan logistic, kebutuhan barang cetak dan penggandaan, bajah bacaan, fasilitasi kunjungan tamu. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 8 subkegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah kegiatan yang menyediakan peralatan dan alat-alat yang mendukung penerangan bangunan. Rencana aksi pada triwulan II (dua) yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja peralatan listrik
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah proses pencatatan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran pekerjaan dan kelancaran administrasi. Reancana aksi para triwulan II (dua) yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belaja modal peralatan studio video dan film
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah kegiatan untuk menyediakan peralatan yang dibutuhkan sebagai sarana penunjang. Rencana aksi pada triwulan II (dua) yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja modal alat rumah tangga lainnya atau belanja tangga aluminium
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah proses pencatatan kebutuhan bahan logistic. Rencana aksi pada triwulan II (dua) yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja BBM dan belanja bahan-bahan lainnya.
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah menyediakan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran. Rencana aksi pada triwulan II (dua) yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja bahan cetak

- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan wawasan mengenai berita yang sedang beredar .Rencana aksi pada triwulan I yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah
- g. Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah kegiatan yang menyediakan kebutuhan makan dan minum untuk tamu. Rencana aksi pada triwulan I yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja makanan dan snack tamu.
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah kegiatan yang meliputi penyelenggaraan rapat koordinasi dan perjalanan dinas. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi rapat koordinasi dan perjalanan dinas, memastikan kegiatan administrasi perkantoran dapat berjalan efektif dan efisien, meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membantu koordinasi dengan instansi terkait. Rencana aksi pada triwulan I yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah mengetahui jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dina luar daerah.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya jasa pelayanan umum kantor agar dapat meningkatkan kinerja petugas pelayanan kantor dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Indikator kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. Tahapan target rencana aksi pada kegiatan ini adalah laporan penyediaan jasa surat menyurat, laporan penyediaan jasa komunikasi,SDA dan Listrik, laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 3 subkegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah pencatatan administrasi surat masuk dan surat keluar. Rencana aksi pada triwulan II yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah mengetahui jumlah surat masuk dan surat keluar dan belanja ATK yang dibutuhkan.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik adalah proses pendataan kebutuhan air dan Listrik. Rencana aksi pada triwulan II yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja air dan Listrik.

- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah proses pendataan tenaga upahjasa pada DPKK. Rencana aksi pada triwulan II yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga kebersihan, belanja jasa tenaga keamanan, belanja jasa tenaga supir.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah adalah kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi fisik bangunan, peralatan, dan mesin yang mendukung urusan pemerintah daerah. Indikator kegiatan adalah persentase BMD yang layak fungsi. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 3 subkegiatan antara lain :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah proses pendataan kendaraan dinas yang layak fungsi. Rencana aksi pada triwulan II yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah jumlah kendaraan yang dipelihara.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah mencakup pemeliharaan layanan terjadwal secara berkala, pemeriksaan rutin, dan perbaikan terjadwal maupun darurat. Perawatan ini juga mencakup penggantian atau penyelarasan ulang komponen yang aus, rusak, atau tidak selaras. Rencana aksi pada triwulan II (satu) yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja pemeliharaan print, laptop, AC, mesin babat.
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah untuk menjaga kelayakan fungsi bangunan gedung dan prasarananya. Rencana aksi pada triwulan II (satu) yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah pemeliharaan Gedung kantor

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran pada APBD DPKPP Kabupaten Luwu Timur sebesar RP. 36.242.037.832,- (Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), untuk triwulan II dianggarkan sebesar Rp. 21.180.344.707 dan terealisasi sebesar Rp. %.179.214.487 persentase sebesar 24,45%. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 20
 Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN					
			PAGU ANGGARAN	ANGGARAN KAS S.D TRIWULAN II	REALISASI ANGGRAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang (%)	1.342.386.250	300.186.250	201.112.600	67,00	1.141.273.650	85,02
		Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni (%)						
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pendataan identifikasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang akan dibangun dan direhabilitasi serta jumlah dokumen hasil pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang termanfaatkan sebagai bahan informasi perumahan (dokumen)	266.099.900	15.899.900	650.000	4,09	265.449.900	100
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus (dokumen)	7.199.000	6.999.000	650.000	9,29	6.549.000	91

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN					
			PAGU ANGGARAN	ANGGARAN KAS S.D TRIWULAN II	REALISASI ANGGRAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana Kabupaten/Kota (dokumen)	258.900.900	8.900.900	-	-	258.900.900	100
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Percentase rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang direhabilitasi dan dibangun (%)	650.000.000	-	-	-	650.000.000	100
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi (unit)	200.000.000	-	-	-	200.000.000	100
	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun (unit)	200.000.000	-	-	-	200.000.000	100
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana Kabupaten/Kota (unit)	250.000.000	-	-	-	250.000.000	100
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Percentase rumah susun/rumah khusus yang dikelola (%)	412.048.100	270.048.100	198.242.600	73,41	213.805.500	52
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus (dokumen)	412.048.100	270.048.100	198.242.600	73,41	213.805.500	52
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi perizinan perumahan yang diterbitkan (rekomendasi)	14.238.250	14.238.250	2.220.000	15,59	12.018.250	84

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN					
			PAGU ANGGARAN	ANGGARAN KAS S.D TRIWULAN II	REALISASI ANGGRAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan (laporan)	14.238.250	14.238.250	2.220.000	15,59	12.018.250	84
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio rumah layak huni (%)	6.546.632.337	2.283.406.337	253.940.376	11,12	6.292.691.961	96
		Persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (%)						
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi (dokumen)	31.786.500	25.786.500	19.730.000	76,51	12.056.500	38
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman (laporan)	31.786.500	25.786.500	19.730.000	76,51	12.056.500	38
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi (dokumen)	416.407.000	408.407.000	16.932.539	4,15	399.474.461	96
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/terreview/terlegalisasi (dokumen)	416.407.000	408.407.000	16.932.539	4,15	399.474.461	96

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN					
			PAGU ANGGARAN	ANGGARAN KAS S.D TRIWULAN II	REALISASI ANGGRAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	6.098.438.837	1.849.212.837	217.277.837	11,75	5.881.161.000	96
		Luas penanganan infrstruktur kawasan kumuh (Ha)						
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki (unit)	2.148.901.000	1.098.310.000	25.900.000	2,36	2.123.001.000	99
	Pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh	Luas permukiman kumuh yang dipugar (Ha)	3.949.537.837	750.902.837	191.377.837	25,49	3.758.160.000	95
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU (%)	15.652.480.405	7.321.957.905	2.618.307.314	35,76	13.034.173.091	83
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah seluruh lingkungan perumahan yang didukung PSU (lingkungan)	15.652.480.405	7.321.957.905	2.618.307.314	35,76	13.034.173.091	83
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian (lokasi)	15.652.480.405	7.321.957.905	2.618.307.314	35,76	13.034.173.091	83
2	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara (%)	3.239.900	2.879.900	740.000	25,70	2.499.900	77
	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus terdaftar (kasus)	3.239.900	2.879.900	740.000	25,70	2.499.900	77

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN					
			PAGU ANGGARAN	ANGGARAN KAS S.D TRIWULAN II	REALISASI ANGGRAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
	Mediasi penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota (Berita acara)	3.239.900	2.879.900	740.000	25,70	2.499.900	77
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase luas lahan yang dibebaskan (%)	7.174.913.950	7.174.893.950	249.517.219	3,48	6.925.396.731	97
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan kebutuhan pembangunan kabupaten pertahun pada tahun n (m²)	7.174.913.950	7.174.893.950	249.517.219	3,48	6.925.396.731	97
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah keputusan Bupati/Wali kota tentang penetapan penerima santunan tanah (Dokumen)	7.174.913.950	7.174.893.950	249.517.219	3,48	6.925.396.731	97
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengamanan tanah kosong aset Pemda (Persen)	68.062.500	56.075.000	-	-	68.062.500	100
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi (Bidang)	68.062.500	56.075.000	-	-	68.062.500	100
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	jumlah laporan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang diinventarisasi (Laporan)	68.062.500	56.075.000	-	-	68.062.500	100
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin lokasi (Persen)	4.844.350	2.774.350	-	-	4.844.350	100

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN					
			PAGU ANGGARAN	ANGGARAN KAS S.D TRIWULAN II	REALISASI ANGGRAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara (Dokumen)	4.844.350	2.774.350	-	-	4.844.350	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara (Dokumen)	4.844.350	2.774.350	-	-	4.844.350	100
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat (Persen)	50.711.450	36.101.450	-	-	50.711.450	100
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas lahan bersertifikat yang difasilitasi (Persen)	50.711.450	36.101.450	-	-	50.711.450	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	50.711.450	36.101.450	-	-	50.711.450	100
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (Persen)	5.398.766.690	4.002.069.565	1.855.596.978	46,37	3.543.169.712	66
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)	126.317.000	91.319.000	20.774.737	22,75	105.542.263	84
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	60.948.000	36.448.000	13.956.000	38,29	46.992.000	77

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN					
			PAGU ANGGARAN	ANGGARAN KAS S.D TRIWULAN II	REALISASI ANGGRAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)	55.369.000	44.871.000	6.818.737	15,20	48.550.263	88
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (Persen)	3.897.186.490	2.735.876.265	1.568.895.337	57,35	2.328.291.153	60
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	3.831.690.750	2.682.183.525	1.541.155.337	57,46	2.290.535.413	60
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD (Laporan)	65.495.740	53.692.740	27.740.000	51,66	37.755.740	58
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan (Persen)	16.674.000	10.374.000	5.250.000	50,61	11.424.000	69

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN					
			PAGU ANGGARAN	ANGGARAN KAS S.D TRIWULAN II	REALISASI ANGGRAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (Laporan)	16.674.000	10.374.000	5.250.000	50,61	11.424.000	69
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah (Rupiah)	7.889.600	4.469.600	2.850.000	63,76	5.039.600	64
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	7.889.600	4.469.600	2.850.000	63,76	5.039.600	64
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (Persen)	117.864.800	94.864.800	23.439.500	24,71	94.425.300	80
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (Dokumen)	33.668.800	25.668.800	6.460.000	25,17	27.208.800	81
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	84.196.000	69.196.000	16.979.500	24,54	67.216.500	80
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (Persen)	335.703.400	308.964.500	131.371.040	42,52	204.332.360	61
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	5.835.000	5.835.000	-	-	5.835.000	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	95.588.100	95.588.100	-	-	95.588.100	100

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN					
			PAGU ANGGARAN	ANGGARAN KAS S.D TRIWULAN II	REALISASI ANGGRAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	16.322.900	10.840.000	4.837.060	44,62	11.485.840	70
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	16.820.000	9.360.000	1.792.000	19,15	15.028.000	89
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	16.320.000	9.000.000	5.790.000	64,33	10.530.000	65
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu (Laporan)	22.476.000	16.000.000	1.368.000	8,55	21.108.000	94
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	162.341.400	162.341.400	117.583.980	72,43	44.757.420	28
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (unit)	112.200.000	112.200.000	-	-	112.200.000	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan (unit)	70.200.000	70.200.000	-	-	70.200.000	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	42.000.000	42.000.000	-	-	42.000.000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah (Persen)	245.431.400	145.401.400	85.871.782	59,06	159.559.618	65

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN					
			PAGU ANGGARAN	ANGGARAN KAS S.D TRIWULAN II	REALISASI ANGGRAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	10.261.400	10.261.400	4.745.000	46,24	5.516.400	54
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	117.690.000	76.400.000	35.576.782	46,57	82.113.218	70
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	117.480.000	58.740.000	45.550.000	77,55	71.930.000	61
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Persen)	539.500.000	498.600.000	17.144.582	3,44	522.355.418	97
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	52.150.000	39.600.000	12.214.582	30,84	39.935.418	77
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	67.350.000	39.000.000	4.930.000	12,64	62.420.000	93
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	420.000.000	420.000.000	-	-	420.000.000	100
	Total Pagu Anggaran		36.242.037.832	21.180.344.707	5.179.214.487	24,45	31.062.823.345	85,71

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan II Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur tahun 2021–2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DPKPP Kabupaten Luwu Timur triwulan II Tahun 2025.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan pada triwulan yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Evaluasi Triwulan II Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan pada triwulan selanjutnya.

Malili, 07 Juli 2025

KEPALA DINAS,



ANDI WIJA HASAN, ST

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197403232003121004

Lampiran
Dokumentasi Pendukung Sasaran I



Dokumentasi Sasaran II

1. Permohonan pengembalian Hak-hak masyarakat yang di klaim oleh PTPN (Persero) Unit Kebun Malili



2. Penyamaan Persepsi dan pandangan terhadap wilayah konsesi/kontrak Karya/IUP – K PT.Vale Ind, Tbk.



Dokumentasi Sasaran III

1. Rapat Evaluasi TW IV Tahun 2024



2. Penyusunan E-Kinerja Tahun 2025



3. Rapat Pembahasan RENSTRA 2026-2029

